

TESIS

**PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA PASCA
REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
*(Studi Kasus Badan Narkotika Kota Padang)***

Oleh :

AFLIANDI

NIM : 1420112061

Tim Pembimbing :

Prof. Dr. H. Elwi Danil SH.,M.H. (Ketua)

Dr. Suharizal, S.H.,M.H. (Anggota)



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA PASCA REHABILITASI OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(Studi Kasus Badan Narkotika Kota Padang)**

(AFLIANDI, S.H., NIM: 1420112061, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 135, Tahun 2017)

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 5,1 juta orang. Besarnya angka ini tentunya perlu sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk menentukan sanksi yang tepat bagi penggunanya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memperkenalkan jenis sanksi diluar sanksi pidana, yaitu sanksi tindakan. Salah satu bentuk dari sanksi tindakan ini adalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sesuai dengan ketentuan UU Narkotika tersebut hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Masa pengobatan dan perawatan inilah yang dipahami sebagai proses rehabilitasi. Pengaturan Rehabilitasi ini ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2011, dan oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Walau sudah ada pengaturan mengenai rehabilitasi ini, namun terdapat persoalan terkait dengan penghitungan waktu masa hukuman. Hakim tidak memperhitungkan dalam putusannya masa atau waktu rehabilitasi yang harus dijalankan oleh Terdakwa/Pecandu. Terkait dengan itu, maka tesis ini membahas tentang proses penyelesaian perkara narkotika pasca rehabilitasi oleh BNN Kota Padang, dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam hal yang tidak termuat dalam pertimbangan hakim dan amar putusan. Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah di atas adalah yuridis sosiologis dengan data primer berasal dari riset lapangan. Setelah melakukan pembahasan didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian perkara narkotika pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan terkait penghitungan masa hukuman terdakwa dalam perkara narkotika pasca rehabilitasi di BNN Kota Padang pun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada dinamika yang begitu berarti, Karena mereka bekerja tunduk pada SOP dan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Narkotika; Pasca Rehabilitasi; BNN Kota Padang.

**COMPLETION OF POST REHABILITATION NARCOTICS BY NATIONAL
NARCOTICS AGENCY
(Case Study of Narcotics Agency on Padang City)**

(AFLIANDI, S.H., NIM: 1420112061, Magister Of Law Program Faculty of Law
University of Andalas, Number of Page 135, Year 2017))

National Narcotics Agency (BNN) estimates the number of drug users in Indonesia reached 5.1 million people. The magnitude of this number is necessary as an evaluation material for policy makers to determine the appropriate sanctions for narcotics users. However, Law Number 35 Year 2009 on Narcotics has introduced a type of sanction outside of criminal sanctions, namely sanctions measures. One form that sanction is rehabilitation for narcotics users. In accordance with the provisions of the Narcotics Act the judge may decide or establish drug addicts to under treatment. This treatment period is understood as a rehabilitation process. This Rehabilitation arrangement was followed up by Supreme Court by issuing SEMA No. 3 Year 2011, and by the Attorney General by issuing SEJA No. SE-002 / A / JA / 02/2013 on the Placement of Narcotics Abuse Victims to Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. Although there are already arrangements for this rehabilitation. The judge does not take into account in the verdict the period or time of rehabilitation that must be carried out by the Defendant / Addicts. Related to that, this thesis discusses the process of settlement of narcotic post-rehabilitation case by BNN Padang City, and how the implementation of rehabilitation in case that is not contained in consideration of judge and decision. The method used in the discussion of the above problem is juridical empiric with primary data derived from field research. After research, it was found out that the process of settlement of narcotic post-rehabilitation case conducted by BNN Padang has been in accordance with the existing provisions, and related to the counting of the sentence of the defendant in post-rehabilitation drug case in BNN Kota Padang running in accordance with the prevailing regulations without any dynamics so meaningful, because they are working subject to SOP and applicable legislation.

Keywords: Narcotics; Post Rehabilitation; BNN Kota Padang.